

Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa

Brain Fransisco Supit¹, Elvis M. C. Lumingkewas²

¹Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹brainsupit@unima.ac.id, ²elvislumingkewas@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Accountability
Competency
Urban Village Fund
Management

Urban Village funds must be managed professionally using the main principles of good governance and clean governance to improve or increase the community's welfare and quality life. This study aimed to analyze whether 1) Accountability has an influence on the management of Urban Village funds; 2) Employee competence has an influence on the management of Urban Village funds; 3) Accountability and competence simultaneously affect the management of Urban Village funds. This research was conducted in 4 urban village of North Kawangkoan Sub-District, namely Talikuran, West Talikuran, North Talikuran and Uner, using quantitative research methods. The samples used were 42 civil servants working in the 4 urban village and North Kawangkoan Sub-District. The results of the study show that 1) Accountability has a significant influence on the management of urban village funds, 2) Employee competence has a significant influence on the management of urban village funds, and 3) Accountability and competence of employees have a significant effect simultaneously on urban village fund management of North Kawangkoan Sub-District.

INTISARI

Kata kunci:
Akuntabilitas
Kompetensi
Pengelolaan Dana
Kelurahan

Dana kelurahan haruslah dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip dasar *Good Governance* dan *Clean Governance* untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji apakah 1) Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan; 2) Kompetensi pegawai mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan; 3) Akuntabilitas dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan. Penelitian ini dilakukan pada 4 kelurahan yang ada di Kecamatan kawangkoan Utara, yaitu Talikuran, Talikuran Barat, Talikuran Utara dan Uner, dengan memakai metode penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 42 orang PNS yang bertugas di 4 kelurahan tersebut dan kecamatan Kawangkoan Utara. Penelitian ini berkesimpulan bahwa 1) Akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan, 2) Kompetensi pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan, dan 3) Secara simultan Akuntabilitas dan Kompetensi pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Kawangkoan Utara.

Diterima : 26-05-2023

Dipublish : 30-06-2023

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dicabut dan diubah ke Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dan terakhir diubah lagi ke dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2015, dijelaskan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan[1]. Kelurahan, yang merupakan satuan kecil pemerintah yang berhadapan atau berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memiliki hak sendiri untuk mengelola alokasi anggaran keuangan kelurahan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Kewenangan kelurahan untuk mengelola anggaran kelurahan secara mandiri sesuai perundang-undangan adalah wujud dari konsep implementasi otonomi daerah.

Dana kelurahan ini bersumber dari APBN melalui pos Dana Alokasi Umum atau DAU tambahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah (melalui APBD) untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Dana kelurahan ini bertujuan untuk kegiatan/aktivitas pembangunan sarpras (sarana dan prasarana) serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan, di mana tata cara pemanfaatan, pengalokasian, pengelolaan, serta pertanggungjawabannya diatur dalam peraturan pemerintah (lihat pasal 230 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 30 PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan)[2][3]. Pattylima dkk menyebutkan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat Kelurahan juga diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan[4]. Adanya pembangunan sarpras (sarana dan prasarana) serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas *Public Service* hingga ke pelosok negeri dan menjangkau seluruh elemen masyarakat.

Untuk anggaran dana Kelurahan tahun 2023 ini menteri keuangan telah *released* Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 / PMK.07 / 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah (ITKD) Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 211 / PMK.07 / 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 139 / PMK.07 / 2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus (DOK) [5][6]. Alokasi

anggaran DAU untuk pendanaan masing-masing kelurahan tahun 2023 disebutkan dalam PMK No. 212 / PMK.07 / 2022 adalah Rp. 200.000.000 (Pasal 6) dan dana tersebut akan dibagikan kepada setiap kelurahan di masing-masing daerah secara merata atau dibagikan berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja kelurahan (pasal 7).

Pengelolaan dana/keuangan di tingkat kelurahan adalah keseluruhan kegiatan/aktivitas yang meliputi aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kelurahan. Pengelolaan dana kelurahan ini tentunya harus dilakukan secara baik, profesional dan tepat sasaran sesuai peraturan yang ada serta prinsip mendasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Yang dimaksud dengan prinsip *good governance* menurut Nubatonis adalah akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi, pelayanan prima, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum [7]. Dalam kegiatan pengelolaan dana ini, sangat dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik agar supaya benar-benar memenuhi kepentingan rakyat dan terhindar dari upaya-upaya penyelewengan atau korupsi yang bisa merugikan masyarakat kelurahan itu sendiri.

Baik dana Desa maupun Kelurahan sangat rawan untuk dikorupsi oleh kepala Desa, Lurah maupun pejabat pengelola lainnya. Nababan mencatat bahwa sesuai data KPK dalam kurun waktu 2015-2022 terdapat 601 kasus korupsi dana desa dengan jumlah tersangka 686 orang[8].

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good and clean governance* merupakan komponen penting dalam pengelolaan dana kelurahan. Prinsip akuntabilitas adalah sebuah prinsip dalam pelayanan publik yang melingkupi ketepatan dan kepastian waktu pelayanan terhadap masyarakat dan memperhatikan/memastikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP peraturan. Akuntabilitas adalah bentuk pengendalian organisasi publik yang dimaksudkan sebagai dasar/landasan untuk memberikan penjelasan kepada pihak internal dan eksternal yang berkepentingan untuk menilai dan mengevaluasi operasi atau kegiatan organisasi publik tersebut [9]. Pemerintah harus menerapkan asas umum akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dimana berorientasi pada hasil, dan setiap pengguna anggaran harus menjawab serta menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan sebuah program yang telah dianggarkan dan menjadi tanggung jawabnya [10].

Dalam mewujudkan akuntabilitas diperlukan juga kompetensi pegawai atau aparatur [11]. Kompetensi adalah kemampuan kerja masing-masing pegawai yang melingkupi 3 aspek yaitu

* Korespondensi Penulis; brainsupit@unima.ac.id

keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja sesuai standar yang ditetapkan. Kompetensi adalah bentuk kombinasi dari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku (*attitude*)[12]. Jika aparatur atau pegawai tidak kompeten khususnya dalam hal pengelolaan dana kelurahan, maka mereka akan kesulitan dalam hal mengelola anggaran, dan membuat serta menyusun laporan pertanggung-jawaban. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat.

Kecamatan Kawangkoan Utara (hasil pemekaran Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa tahun 2010) terdiri dari 6 desa dan 4 kelurahan. 4 kelurahan yang dimaksud adalah Talikuran, Talikuran Barat, Talikuran Utara dan Uner. Berdasarkan data BPS Kabupaten Minahasa, luas wilayah Kecamatan ini adalah 13,0996 KM².

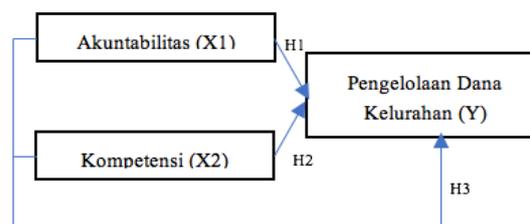
Berdasarkan observasi, peneliti menemukan bahwa pengelolaan dana kelurahan di kecamatan Kawangkoan Utara belum optimal khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat di kelurahan-kelurahan tersebut kurang mendapatkan informasi atau sosialisasi tentang pemanfaatan dana kelurahan tersebut. Fasilitas umum seperti sarana prasarana penerangan jalan tidak berjalan dengan baik. Saat malam hari terlihat jalan-jalan utama pemukiman begitu gelap. Selain itu, belum ada sarana pembuangan sampah umum yang dibangun di lingkungan kelurahan. Juga, sarpras (sarana prasarana) bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti Taman Bacaan Masyarakat belum ada. Beberapa permasalahan tersebut, masuk dalam ruang lingkup pembangunan sarana prasarana pengelolaan dana kelurahan. Selain itu, pengelolaan dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat juga terlihat belum berjalan dengan maksimal/optimal. Hal ini dibuktikan dengan belum berjalannya penyelenggaraan pos keamanan kelurahan, belum adanya pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, penyelenggaraan pelatihan, pendampingan dan pembimbingan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pengelolaan dana kelurahan ini membutuhkan akuntabilitas, transparansi dan kompetensi yang baik dari semua pegawai penyelenggara pemerintahan kelurahan yang didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menemukan *research gap* dalam hal pengelolaan dana kelurahan di kecamatan Kawangkoan Utara yang dirasa perlu untuk dilakukan penelitian dalam rangka memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah kelurahan setempat agar supaya sasaran kebijakan dan pelayanan publik bisa tercapai dan memberikan manfaat besar bagi seluruh elemen masyarakat. Sesuai apa yang disampaikan oleh Nugroho bahwa suatu kebijakan publik harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan[13]. Program dana kelurahan yang sudah baik haruslah diimplementasikan dengan

baik pula. Karena, dengan implementasi yang baik, kebijakan-kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah akan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat [14].

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Pegawai terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa”. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menguji apakah 1) Akuntabilitas (X1) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pengelolaan Dana Kelurahan (Y), 2) Kompetensi pegawai (X2) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pengelolaan Dana Kelurahan (Y), dan 3) Akuntabilitas (X1) dan Kompetensi (X2) secara memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap pengelolaan Dana Kelurahan (Y) di Kecamatan Kawangkoan Utara.

Hipotesis penelitian ini adalah 1) Akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan Dana Kelurahan (H1), 2) Kompetensi memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan Dana Kelurahan (H2), dan 3) Secara simultan Akuntabilitas dan Kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan (H3). Hipotesis penelitian ini bisa terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.1. Hipotesis Penelitian

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Lokasi penelitian adalah kecamatan Kawangkoan Utara khususnya 4 kelurahan yang ada di Kecamatan tersebut, yaitu Talikuran, Talikuran Barat, Talikuran Utara dan Uner. Sampel penelitian berjumlah 42 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di kelurahan-kelurahan tersebut dan kecamatan Kawangkoan Utara.

Sumber data primer yang diolah dalam penelitian ini adalah hasil sebaran kuesioner/angket yang kepada semua sampel penelitian. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Indikator variabel akuntabilitas (X1) menurut David Halmer dan Mark Tuner adalah 1) Validasi untuk pembuat kebijakan, 2) kualitas moral, 3) keterbukaan, 4) kepekaan, 5) pemanfaatan *resources* atau sumber daya secara optimal, dan 6) efisiensi serta efektivitas [15]. Indikator variabel Kompetensi (X2) menurut

Mathis dan Jackson adalah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan[16]. Sedangkan, indikator pengelolaan dana kelurahan (Y) adalah tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, tahap pelaporan, serta pertanggungjawaban.

Data yang dihasilkan kemudian diolah/dianalisis dengan menggunakan program komputer IBM SPSS Statistics version 26. Analisis dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Sebelum dilakukan uji Hipotesis penelitian (uji Parametrik), terlebih dahulu dilakukan analisis data dengan menggunakan pengujian Validitas, Reliabilitas dan uji Asumsi Klasik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Uji Validitas

Kuesioner disusun berdasarkan indikator operasional variabel dengan menggunakan skala Likert.

Diketahui r tabel adalah 0.3044. Formula yang dipakai adalah $Df = n - 2$ ($42 - 2 = 40$). Dengan menggunakan taraf signifikansi 0.05 (5%), ditemukan derajat kebebasan (Df) sebesar 40. Maka r tabelnya adalah 0.3044. Kriteria yang dipakai dalam uji Validitas adalah jika r hitung > r tabel dan nilai sig. < 0.05, maka data kuesioner bersifat valid, begitu pun sebaliknya. Berdasarkan pengolahan data hasil kuesioner, maka diperoleh data dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Hasil Uji Validitas X1

No. Butir Soal	Nilai r hitung	Nilai Sig.	Nilai r tabel	Keterangan
1	0.714	0.000	0.3044	Valid
2	0.714	0.000	0.3044	Valid
3	0.532	0.000	0.3044	Valid
4	0.340	0.028	0.3044	Valid
5	0.612	0.000	0.3044	Valid
6	0.585	0.000	0.3044	Valid
7	0.527	0.000	0.3044	Valid
8	0.352	0.022	0.3044	Valid
9	0.670	0.000	0.3044	Valid
10	0.316	0.041	0.3044	Valid

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas X2

No. Butir Soal	Nilai r hitung	Nilai Sig.	Nilai r tabel	Keterangan
1	0.386	0.011	0.3044	Valid
2	0.389	0.011	0.3044	Valid
3	0.428	0.005	0.3044	Valid
4	0.309	0.047	0.3044	Valid

5	0.419	0.006	0.3044	Valid
6	0.491	0.001	0.3044	Valid
7	0.548	0.000	0.3044	Valid
8	0.487	0.001	0.3044	Valid
9	0.314	0.043	0.3044	Valid
10	0.340	0.028	0.3044	Valid

Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Y

No. Butir Soal	Nilai r hitung	Nilai Sig.	Nilai r tabel	Keterangan
1	0.495	0.001	0.3044	Valid
2	0.709	0.000	0.3044	Valid
3	0.632	0.000	0.3044	Valid
4	0.734	0.000	0.3044	Valid
5	0.452	0.003	0.3044	Valid
6	0.628	0.000	0.3044	Valid
7	0.532	0.000	0.3044	Valid
8	0.801	0.000	0.3044	Valid
9	0.482	0.001	0.3044	Valid
10	0.462	0.002	0.3044	Valid

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, terlihat r hitung dari masing-masing variabel yang diuji > r tabel, nilai sig. < 0.05. Maka ditarik kesimpulan bahwa data kuesioner bersifat valid, dan bisa dipakai untuk melakukan uji selanjutnya.

3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini diuji melalui analisis Cronbach's Alpha (CA) dengan dasar/kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika nilai CA > 0.60 maka data bersifat reliabel, begitupun sebaliknya. Hasil pengujian reliabilitas bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1, X2, Y

Reliability Statistics (X1)	
Cronbach's Alpha	N of Items
.641	10

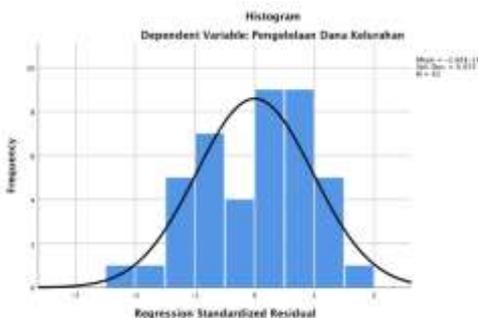
Reliability Statistics (X2)	
Cronbach's Alpha	N of Items
.657	10

Reliability Statistics (Y)	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.747	10

Berdasarkan hasil uji di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa data kuesioner yang diuji sudah bersifat reliabel karena nilai CA yang diperoleh > 0.60. Jika dilakukan uji berulang maka data tetap akan konsisten.

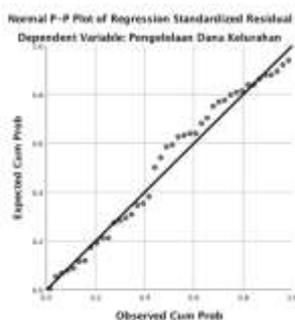
3.3. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas



Gambar 3.1. Hasil Histogram Test

Dasar/kriteria pengambilan keputusan dengan menggunakan uji Histogram adalah jika kurva yang dihasilkan membentuk *Mountain Shape Curve* (berbentuk seperti gunung), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang diuji telah terdistribusi dengan normal [17]. Berdasarkan hasil histogram test di atas maka data bersifat normal.



Gambar 3.2. Hasil P-Plot Test

Selanjutnya dilakukan *P-Plot Test*. Melalui uji ini data dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik sebaran data yang dihasilkan menyebar mengikuti garis diagonal. Dari gambar 3.2 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data telah terdistribusi normal.

Setelah itu, dilanjutkan dengan uji normalitas melalui *One Sample Kolmogorov-Smirnov test*. Dasar atau kriteria pengambilan keputusan melalui uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* adalah jika nilai signifikansi > 0.05, maka data lolos uji normalitas dan bisa dipakai untuk

persamaan regresi [18]. Berikut adalah hasil *One Sample Kolmogorov-Smirnov test*:

Tabel 3.5. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	43.1190476
	Std. Deviation	1.88722644
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.057
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan dasar pengambilan tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi dengan normal, yaitu ditunjukkan dengan nilai *Asymp. Sig.* adalah sebesar 0.200, di mana nilai tersebut > 0.05.

2) Uji Multikolinearitas

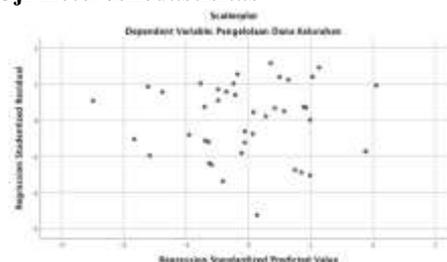
Tabel 3.6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
1								
	Constant	11.187	6.234	1.810	.187			
	Aktivitas	.664	.160	.403	2.905	.006	.999	1.001
	Restorasi	.298	.151	.284	2.047	.047	.999	1.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Keluaran

Jika nilai *Tolerance* yang dihasilkan > 0.10 dan nilai *VIF* < 10.00, maka tidak terdapat multikolinearitas antara variabel dan bisa dipakai dalam persamaan regresi. Berdasarkan dasar pengambilan tersebut dan hasil uji Multikolinearitas di tabel di atas, terlihat bahwa nilai *Tolerance* adalah 0.999 (artinya > 0.10) dan nilai *VIF* adalah 1.001 (artinya < 10.00). Maka, ditarik kesimpulan bahwa dasar pengambilan keputusan sudah terpenuhi. Tidak terjadi multikolinearitas antara variabel yang diteliti dan bisa dilakukan uji regresi linear berganda.

3) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melakukan uji *Scatter Plot Graphic*. Dalam grafik tersebut, terlihat bahwa data menyebar secara acak

di atas dan di bawah titik/garis Y. Maka ditarik kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung atau terbebas dari heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Tabel 3.7. Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.500 ^a	.250	.211	3.353	1.966

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Akuntabilitas
b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui nilai $dU=1.6061$, $4-dU(4-1.6061)=2.3939$, $d=1.966$ dan $dL=1.4073$. Suatu model regresi dikatakan terbebas dari autokorelasi jika memenuhi kriteria persamaan ini: $dL < d < 4-dU$. Hasil pengujian jika dimasukkan ke dalam persamaan tersebut, maka akan ditemukan bahwa $1.4073 < 1.966 < 2.3939$. Berdasarkan data tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa di dalam persamaan regresi ini tidak terjadi autokorelasi dan bisa dipakai dalam pengujian regresi.

3.4. Model Regresi Linear Berganda

Tabel 3.8. Model Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.587	8.234		1.650	.107
	Akuntabilitas	.464	.160	.403	2.905	.006
	Kompetensi	.268	.131	.284	2.047	.047

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan

Berdasarkan hasil data output SPSS di atas, maka diperoleh persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 13.587 + 0.464X_1 + 0.268X_2 + e$$

- Nilai konstanta memiliki nilai positif yaitu 13.587. Tanda positif ini menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel bebas (Akuntabilitas dan Kompetensi) dan variabel terikat (Pengelolaan Dana Kelurahan). Dengan asumsi semua variabel bebas X_1 dan X_2 bernilai 0 atau tidak terjadi perubahan, maka nilai Y adalah 13.587.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel X_1 (Akuntabilitas) adalah 0.464. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel Akuntabilitas (X_1) dan variabel Pengelolaan Dana Kelurahan (Y). Artinya jika nilai variabel X_1 mengalami peningkatan sebesar 1 %, dengan asumsi nilai variabel lain tetap konstan, maka nilai variabel Y akan meningkat sebesar 0.464.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel X_2 (Kompetensi) adalah 0.268. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel Kompetensi (X_2) dan variabel Pengelolaan Dana Kelurahan (Y). Artinya jika nilai variabel X_2 mengalami peningkatan sebesar 1 %,

dengan asumsi nilai variabel lain tetap konstan, maka nilai variabel Y akan meningkat sebesar 0.268.

3.5. Uji Hipotesis Penelitian

1) Uji Hipotesis Pertama (H1)

Yaitu, variabel Akuntabilitas (X_1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel Pengelolaan Dana Kelurahan (Y). Dasar/kriteria pengambilan keputusannya adalah jika t hitung $>$ t tabel, dan nilai sig. $<$ dari 0.05, maka hipotesis pertama ini bisa diterima. Pengujian dilakukan dengan uji t (t test).

Berdasarkan model regresi linear berganda yang dihasilkan pada tabel 3.8 di atas, terlihat bahwa pada variabel Akuntabilitas (X_1) diperoleh t hitung sebesar 2.905 dan nilai sig. 0.006. Sedangkan, t tabel yang diketahui adalah 2.01 (lihat t tabel pada taraf signifikansi 5% atau 0.05). Artinya, t hitung lebih besar dari t tabel ($2.905 > 2.01$) dan nilai sig. yang diperoleh lebih kecil dari 0.05 ($0.006 < 0.05$).

Maka dari itu, disimpulkan bahwa uji hipotesis pertama ini diterima. Akuntabilitas secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan.

Hasil pengujian hipotesis pertama ini sejalan dengan hasil penelitian dari Putri dkk. yang menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas mempunyai dampak atau pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan yang berada di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun [19]. Hal yang sama juga, disampaikan oleh Siregar dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas sangat berpengaruh pada Pengelolaan Keuangan Kelurahan [20].

Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good and clean governance* merupakan komponen penting dalam pengelolaan dana kelurahan [21].

2) Uji Hipotesis Kedua (H2)

Yaitu, variabel Kompetensi Pegawai (X_2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel Pengelolaan Dana Kelurahan (Y). Dasar/kriteria pengambilan keputusannya adalah jika t hitung $>$ t tabel, dan nilai sig. $<$ dari 0.05, maka hipotesis kedua ini bisa diterima. Pengujian dilakukan dengan uji t (t test).

Berdasarkan model regresi linear berganda yang dihasilkan pada tabel 3.8 di atas, terlihat bahwa pada variabel Kompetensi (X_2) diperoleh t hitung sebesar 2.047 dan nilai sig. 0.047. Sedangkan, t tabel yang diketahui adalah 2.01 (lihat t tabel pada taraf signifikansi 5% atau 0.05). Artinya, t hitung lebih besar dari t tabel ($2.047 > 2.01$) dan nilai sig. yang diperoleh lebih kecil dari 0.05 ($0.047 < 0.05$).

Maka dari itu, disimpulkan bahwa uji hipotesis kedua ini juga diterima. Kompetensi

pegawai secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan.

Hasil pengujian dari hipotesis kedua ini sejalan dengan hasil pengujian dari Djmiraga dan Widajantie, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa variabel Kompetensi mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan [22]. Mufidah dan Masnun dalam penelitian mereka, juga menyimpulkan bahwa Kompetensi Pegawai sangat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan, khususnya untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan [23].

Dalam melakukan setiap pekerjaan, Kompetensi SDM berperan penting. Apalagi dalam hal mengelola keuangan daerah (desa atau kelurahan). Pegawai yang kompeten harus memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan kelurahan sehingga tujuan dan sasaran dana Kelurahan bisa tercapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Hutapea dan Thoha, bahwa kompetensi merupakan kapasitas yang terdapat dalam diri pribadi setiap individu yang dapat menjadikan individu tersebut mampu memenuhi apa yang diminta oleh setiap pekerjaan yang berada di dalam suatu organisasi, hasil atau tujuan organisasi tersebut bisa dicapai [24].

3) Uji Hipotesis Ketiga (H3)

Yaitu, variabel Akuntabilitas (X1) dan Kompetensi Pegawai (X2) mempunyai pengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Pengelolaan Dana Kelurahan (Y). Dasar pengambilan keputusannya adalah jika F hitung > F tabel, dan nilai sig. < dari 0.05, maka hipotesis ketiga ini bisa diterima. Pengujian dilakukan dengan uji F (*Anova test*).

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS IBM versi 26, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	146.027	2	73.013	6.496	.004 ^b
	Residual	438.378	40	11.240		
	Total	584.405	42			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan
b. Predictors: (Constant), Kompetensi, Akuntabilitas

Berdasarkan hasil uji F di atas, diperoleh F hitung sebesar 6.496 dan nilai sig. 0.004. Sedangkan, F tabel yang diketahui adalah 3.23 (lihat F tabel pada taraf signifikansi 5% atau 0.05). Artinya, F hitung yang diperoleh lebih besar dari F tabel (6.496 > 3.23) dan nilai sig. yang diperoleh lebih kecil dari 0.05 (0.004 < 0.05).

Maka dari itu, disimpulkan bahwa uji hipotesis ketiga ini juga diterima. Akuntabilitas dan Kompetensi pegawai secara simultan memiliki

pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan.

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan, pemerintah harus menggunakan anggaran secara efektif dan efisien serta mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawaban atas pengelolaan dana kelurahan secara transparan dan tepat waktu. Untuk menunjang akuntabilitas tersebut, tentu harus didukung pula oleh Kompetensi SDM yang sesuai dan memadai.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputra dkk, dalam penelitian mereka tentang pengelolaan dana desa, mereka menyimpulkan bahwa praktik akuntabilitas dan kompetensi SDM sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa khususnya dalam pencegahan Fraud, yaitu kecurangan dalam pengelolaan keuangan [25].

3.6. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi ini dilakukan untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh (*effect*) variabel bebas, yaitu Akuntabilitas (X1) dan Kompetensi Pegawai (X2), terhadap variabel terikat atau Pengelolaan Dana Kelurahan (Y).

Tabel 3.10. Coefficient Determination Result Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.500 ^a	.250	.211	3.353

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hasil Koefisien Determinasi (R²) adalah 0.250 atau 25% (Jika diubah ke bentuk persentase).

Hal ini mengartikan bahwa variabel Akuntabilitas dan Kompetensi Pegawai mempunyai pengaruh sebesar 25% terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan. 75% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Akuntabilitas (X1) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan (Y) di Kecamatan Kawangkoan Utara. Hal ini dibuktikan dengan t hitung yang dihasilkan lebih besar dari t tabel (2.905 > 2.01) dan nilai sig. yang diperoleh lebih kecil dari 0.05 (0.006 < 0.05).
- 2) Kompetensi Pegawai (X2) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan (Y) di Kecamatan Kawangkoan Utara. Hal ini

dibuktikan dengan t hitung yang dihasilkan lebih besar dari t tabel ($2.047 > 2.01$) dan nilai sig. yang diperoleh lebih kecil dari 0.05 ($0.047 < 0.05$)

- 3) Akuntabilitas (X1) dan Kompetensi Pegawai (X2) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan (Y) di kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa. Hal ini dibuktikan dengan F hitung yang dihasilkan lebih besar dari F tabel ($6.496 > 3.23$) dan nilai sig. yang diperoleh lebih kecil dari 0.05 ($0.004 < 0.05$). Besar pengaruh variabel (Koefisien Determinasi) Akuntabilitas dan Kompetensi Pegawai terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan adalah sebesar 25% dan 75% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Referensi

- [1] R. Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah," *Jakarta (Id): Ri. Sekretariat Negara RI*, Jakarta, 2004.
- [2] R. Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2010.
- [3] R. Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan." Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2018.
- [4] L. J. Pattylima, M. T. Lopian, and W. Waworundeng, "Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan (Suatu Studi Di Kelurahan Uwuran 2 Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Selatan)," *J. Eksek.*, vol. 3, no. 1, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/45918>
- [5] M. K. R. Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan No. 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus." Kementerian Keuangan, Jakarta, 2022.
- [6] M. K. R. Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023." Kementerian Keuangan, Jakarta, 2022.
- [7] S. E. Nubatonis, S. Rusmiwari, and S. Suwasono, "Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 3, no. 1, 2015, doi: <https://doi.org/10.33366/jisip.v3i1.68>
- [8] W. Nababan, "Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat," *Kompas*, Jakarta, 2023. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/rawan-korupsi-pengawasan-dana-desa-harus-diperkuat>
- [9] K. W. Wicaksono, "Akuntabilitas organisasi sektor publik," *JKAP (Jurnal Kebijak. Dan Adm. Publik)*, vol. 19, no. 1, pp. 17–26, 2015, doi: <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- [10] B. F. Supit and E. M. C. Lumingkewas, *Pengantar Administrasi Keuangan Daerah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- [11] R. H. E. Sendouw, J. Mantiri, and B. F. Supit, *Administrasi Perpajakan Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- [12] R. Rosmaini and H. Tanjung, "Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai," *Maneggio J. Ilm. Magister Manaj.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–15, 2019, doi: <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3366>
- [13] E. E. Masengi, E. M. C. Lumingkewas, and B. F. Supit, "Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline in the Finance, Asset, and Revenue Management Office of Minahasa Regency," *Tech. Soc. Sci. J.*, vol. 40, pp. 11–22, 2023, doi: <https://doi.org/10.47577/tssj.v40i1.8404>
- [14] A. R. Dilapanga, T. Pangalila, and B. F. Supit, "Analysis Of Village Direct Cash Assistance Policy Implementation In East Bolaang District Bolaang Mongondow Regency," *Tech. Soc. Sci. J.*, vol. 39, pp. 89–97, 2023, doi: <https://doi.org/10.47577/tssj.v39i1.8260>
- [15] S. T. Princessa, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat)," Universitas Islam Riau, Riau, 2022. [Online]. Available: <https://repository.uir.ac.id/16711/>
- [16] E. Elizar and H. Tanjung, "Pengaruh Pelatihan, Kompetensi, Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai," *Maneggio J. Ilm. Magister Manaj.*, vol. 1, no. 1, pp. 46–58, 2018, doi: <https://doi.org/10.30596/maneggio.v1i1.2239>
- [17] V. F. Karundeng, L. Lumingkewas, and F. Mamonto, "The Effect Of Position Promotion And Mutation On The Performance Of Administrator Officials In Tomohon City Government," *Tech. Soc.*

- Sci. J.*, vol. 41, no. 1, pp. 17–32, 2023, doi: <https://doi.org/10.47577/tssj.v41i1.8570>
- [18] I. Ghozali, *Aplikasi analisis multivariete IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- [19] W. M. Putri, R. Sripeni, and A. H. K. Broto, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun,” *JAMER J. Akunt. Merdeka*, vol. 1, no. 2, pp. 94–104, 2020, [Online]. Available: [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3236860&val=28334&title=Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3236860&val=28334&title=Pengaruh%20Transparansi%20Akuntabilitas%20Dan%20Partisipasi%20Terhadap%20Pengelolaan%20Keuangan%20Kelurahan%20Di%20Kecamatan%20Kartoharjo%20Kota%20Madiun)
- [20] M. Siregar, “Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat),” *J. Ilm. Kohesi*, vol. 4, no. 2, p. 59, 2020, [Online]. Available: <https://kohesi.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/128>
- [21] M. Mashuri, S. Suwarno, and T. Pramono, “Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Perspektif Community Driven Development,” *J. Mediasosian J. Ilmu Sos. Dan Adm. Negara*, vol. 4, no. 1, 2020, doi: <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.819>
- [22] A. C. Djamiraga and T. D. Widajantie, “Pengaruh kompetensi dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan pada kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya,” *Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 11, pp. 4806–4814, 2022, doi: <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1779>
- [23] M. Mufidah and M. Masnun, “Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi,” *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 5, no. 2, pp. 519–525, 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.408>
- [24] M. Zalwiwan, “Analisis Kompetensi Pegawai Pada Kantor Camat Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak,” *E-Jurnal Equilib. Manaj.*, vol. 7, no. 1, pp. 81–89, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.upb.ac.id/index.php/equalibrium/article/view/129>
- [25] K. A. K. Saputra, P. D. Pradnyanitasari, N. M. I. Priliandani, and I. G. B. N. P. Putra,

“Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Krisna Kumpul. Ris. Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 168–176, 2019, [Online]. Available: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/915>



© 2023 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).